



Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan

Balai Kota, Warta Kota

Sebanyak 3,4 juta kendaraan di Jakarta menunggak pajak kendaraan hingga mencapai Rp 895 miliar. Dinas Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggelar program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Andri Kunarso, Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, mengatakan, program tersebut digelar mulai 25 Juni hingga 25 Agustus 2015.

"Dari data yang kami himpun sejak 2010 hingga 2015, dari 6,1 juta motor terdapat 3 juta motor belum membayar pajak. Tunggakan pajaknya mencapai Rp 395 miliar," kata Andri, Kamis (25/6).

Sedangkan, kata Andri, dari 2 juta mobil, ada 400.000 mobil belum membayar pajak dengan total tunggakan pajak sebanyak Rp 500 miliar. Maka total tunggakan motor dan mobil mencapai Rp 895 miliar.

Menurut Andri, program tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan PKB dan BBNKB, serta tertib administrasi kendaraan. Tahun ini, target PKB Rp 6,65 triliun, tetapi hingga 24 Juni 2015 baru mencapai 2,58 triliun. Sedangkan target BBNKB sebanyak Rp 4,75 triliun, dan hingga 24 Juni 2015 baru mencapai Rp 2,3 triliun.

Razia

Sementara itu, Edi Sumantri,

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah (Rembang) Dinas Pelayanan Pajak DKI, mengatakan, waktu yang diberikan selama dua bulan tersebut cukup.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, kata Edi, rencananya akan melakukan nota kesapahaman dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Isi nota kesapahaman itu akan melakukan razia kendaraan bermotor yang belum membayar PKB.

"Rencananya kami akan melakukan nota kesapahaman minggu pertama Agustus. Akan melakukan razia selama satu minggu. Razia tersebut akan diberikan surat penagihan pajak," kata Edi. (suf)